



Harga Bahan Pokok Masih Terkendali

■ Disdag Kota Yogya Belum Batasi Pembelian di Kios Segoro Amarto

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta belum melakukan pembatasan pembelian di Kios Segoro Amarto. Pembatasan belum dilakukan karena harga bahan pokok di pasar masih terkendali.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan, Kios Segoro Amarto berfungsi sebagai rujukan harga dan pengendalian inflasi. Kios Segoro Amarto juga menjual bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan lain-lain.

Masyarakat bisa melihat harga-harga di Kios Segoro Amarto sebagai pembanding, termasuk melakukan pembelian. "Ketika kebutuhan masyarakat itu banyak, akan dilakukan pembatasan. Tetapi saat ini belum ada pembatasan, karena harga masih terkendali," katanya, Kamis (27/2).

"Kios Segoro Amarto bisa jadi rujukan harga. Masyarakat bisa melihat harganya berapa, untuk perbandingan. Mau beli di Kios Segoro Amarto bisa, pasar bisa, retail juga bisa, silakan pilih yang paling murah menurut masyarakat," sambungnya.

Lebih lanjut Ambar juga memastikan jika ketersediaan bahan pokok di Kios Segoro Amarto aman. Selama ini, pihaknya sudah bermitra dengan pihak Bulog Yogyakarta, Bank Indonesia, dan BPD DIY.

Saat ini, Pemkot Yogyakarta telah memiliki empat Kios Segoro Amarto, yang berada di Pasar Beringharjo, Kranggan, Prawirotaman, dan Sentul. Pihaknya pun akan menambah satu Kios Segoro Amarto.

"Sekarang ada empat titik, kami akan tambah di Pasar Demangan, jadi lima titik. Target (penambahan kios Segoro Amarto) tahun ini (tahun 2025)," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia

PASTIKAN STOK AMAN

- Dinas Perdagangan Kota Yogya belum membatasi pembelian di Kios Segoro Amarto.
- Pembatasan belum dilakukan karena harga bahan pokok di pasar saat ini masih terkendali.
- Pemkot juga memastikan jika ketersediaan bahan pokok di Kios Segoro Amarto aman.
- Pihak Pemkot sudah bermitra dengan pihak Bulog Yogyakarta, Bank Indonesia, dan BPD DIY.

DIY, Ibrahim menyebut ada beberapa komoditas yang perlu diwaspadai selama bulan puasa hingga Idulfitri. Pasolnya, komoditas tersebut berpotensi mengerek inflasi di DIY.

Adapun komoditas yang perlu diperhatikan adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng. Komoditas tersebut menjadi penyumbang inflasi pangan sejak 2020 hingga 2024 selama bulan puasa.

"Tetapi bawang merah dan cabai merah, masih semester 1 untuk bawang merah dan cabai merah di DIY relatif aman. Sehingga secara average untuk komoditi ini masih terjadi deflasi, karena pas panen besar," katanya.

"Tetapi untuk komoditi lainnya, karena demand meningkat, sementara pasokannya pertambahannya tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan, maka bisa saja terjadi kenaikan harga," sambungnya.

Data Perwakilan BI DIY, rata-rata inflasi (mtm) selama satu bulan jelang Idulfitri empat tahun terakhir, beras mengalami inflasi 0,92 persen, daging ayam ras inflasi 4,17 persen, telur ayam ras inflasi 1,75 persen, dan minyak goreng inflasi 2,02

persen. Bawang merah justru deflasi sebesar 0,15 persen dan cabai merah deflasi 12,49 persen.

Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi selama bulan puasa, seperti pemantauan ketersediaan pasokan dan harga komoditas utama, melakukan perhitungan neraca pangan berdasarkan proyeksi kedatangan wisatawan di akhir tahun untuk memperkirakan kecukupan pangan di DIY, serta optimalisasi APBD 2025 untuk mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Yang tak kalah penting adalah melakukan koordinasi dan pengawasan untuk menjamin ketersediaan hingga distribusi BBM dan LPG di masyarakat. Koordinasi rutin dengan pemasok utama juga harus dilakukan, untuk memastikan kesiapan pasokan.

"Intinya ada potensi demand yang meningkat di masyarakat, kemudian melalui TTID di berbagai daerah, termasuk se-Jawa ini kita kombinasi, kami pastikan itu tertangani dengan baik terkait pemenuhan pasokannya," ujarnya.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya peran off-taker dalam memenuhi ketersediaan pasokan daerah antarwaktu dan antardaerah. Off-taker sangat penting bagi petani agar produk pertanian bisa terserap pedagang, pemerintah daerah, atau pemerintah kerja sama dengan KAD (berja sama antar daerah).

"Artinya tidak ada harga (produk pertanian) yang jatuh. Tetapi di sisi lain, off-taker juga penting ketika saat di luar musim (panen raya), dia (off-taker) punya stok jaminan yang cukup, sehingga antarwaktu dan antardaerah itu terjaga. Makanya itu kami perkuat dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNIP) Jawa 2025," imbuhnya. (jawa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005